



PEMERINTAH
KOTA SOLOK

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



20
24



1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dapat dilihat dari Capaian Kinerja Makro yang merupakan hasil dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan nilai yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu daerah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang diukur dari sisi pengeluaran yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan setiap bulannya. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.

c. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan.

Penganggur terbuka terdiri dari :

- 1) Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- 2) Penduduk yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- 3) Penduduk yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan.



- 4) Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan dengan menggunakan PDB/PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis PDB/PDRB yaitu:

- 1) PDB/PDRB Atas dasar harga berlaku
Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
- 2) PDB/PDRB atas dasar harga konstan
Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun.

e. Pendapatan per Kapita

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita dari suatu daerah. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan pendapatan per kapita, yaitu:

- 1) PDRB PerKapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga.
- 2) PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

f. Ketimpangan Pendapatan

Untuk melihat ketimpangan pendapatan pada suatu daerah dihitung dengan menggunakan *gini ratio* yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).



Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kota Solok untuk masing-masing indikator dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Tahun 2023	Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	79,66	80,06	0,502
2	Angka Kemiskinan	3,05	3,07	0,656
3	Angka Pengangguran	3,72	3,62	(2,688)
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,81	4,55	(4,05)
5	Pendapatan Per kapita (<i>Juta Rupiah</i>)	67,60	69,99	3,536
6	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,256	0,251	(9,53)

Sumber: BPS

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN)

2.1 URUSAN PENDIDIKAN

2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar Dinas Pendidikan Kota Solok adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Dasar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pelayanan Dasar Pengelolaan Pendidikan Dasar
- c. Pelayanan Dasar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

2.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 2.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pengelolaan Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga negara usia 5 s/d 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pengelolaan Pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia 7 s/d 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%
3	Pengelolaan Pendidikan kesetaraan/Non Formal	Jumlah Warga Negara Usia 7 s/d 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

2.1.3 Realisasi

Tabel 2.2
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga negara usia 5 s/d 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2694 orang	2694 orang	100%
2	Pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia 7 s/d 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	14296 orang	14441 orang	100%
3	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 s/d 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	288 orang	288 orang	100%

2.1.4 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kota Solok Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



- a. Belum maksimalnya pengumpulan data khususnya verifikasi
- b. Belum dilakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar secara keseluruhan.
- c. Belum dilakukan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
- d. Belum samanya persepsi pejabat pelaksana teknis yang terkait langsung dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Adapun solusi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan Bappeda untuk dapat memfasilitasi kegiatan pemenuhan SPM dalam perubahan Renja dan RPJMD Dinas Pendidikan
2. Melibatkan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk memfasilitasi kebutuhan data yang berada di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil serta data siswa di bawah Kementrian Agama
3. Akan dilakukan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar serta menyusun rencana pemenuhan kebutuhan tersebut.
4. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan
5. Sinkronisasi dan verifikasi data secara vaktual.

2.2 URUSAN KESEHATAN

2.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Solok sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan



Kab/Kota. Jenis pelayanan Dasar Yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

2.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 2.3
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada	Persentase warga negara usia 60 tahun	100%



	Usia Lanjut	Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

2.2.3 Realisasi

Tabel 2.4
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	1654 orang	1185 orang	77,32%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100%	1654 orang	1119 orang	74,12%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	1483 orang	1106 orang	79,66%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	5975 orang	4583 orang	81,36%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	12146 orang	11407 orang	95,13%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	50727 orang	67066 orang	97,89%
7.	Pelayanan	Persentase warga	100%	7507	5795	81,76%



	Kesehatan pada Usia Lanjut	negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		orang	orang	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	6155 orang	5665 orang	93,63%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	897 orang	1322 orang	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	166 orang	157 orang	95,66%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	2174 orang	2465 orang	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	2869 orang	5113 orang	100%

2.2.4 Permasalahan dan Solusi

Dalam Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kota Solok Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

Dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Kota Solok Masih Menggunakan data sasaran proyeksi yang dikeluarkan oleh Pusdatin (Kemenkes).

a. Penggunaan Data ini menyebabkan 4 (empat) dari 12 indikator Pelayanan dasar tidak mencapai target. Hal ini terjadi karena

perbedaan jumlah sasaran yang ditemui di lapangan (kondisi riil).

b. Komitmen Petugas dalam pelaksanaan pelayanan Dasar belum Optimal.

c. Partisipasi Masyarakat masih kurang dalam pelaksanaan pelayanan dasar seperti:

- Masih banyaknya penolakan dari orang tua untuk mengimunisasi anaknya.
- Masyarakat belum maksimal memanfaatkan sarana UKBM yang ada Posbindu, Posyandu dll.
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera memeriksakan diri dan mengunjungi fasilitas kesehatan Ketika mengalami gejala Penyakit-penyakit tertentu

b. Solusi

a. Menetapkan Sasaran RIIL, untuk mencapai capaian SPM 100%

b. Membuat komitmen dengan petugas terkait pelayanan SPM

c. Meningkatkan Promosi Kesehatan/Penyuluhan kepada Masyarakat.

d. Melakukan Koordinasi dengan lintas sektor terkait Pelayanan SPM.

2.3 Urusan Pekerjaan Umum

2.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditetapkan jenis pelayanan dasar pada Standar



Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 2.5
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari -hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik wilayah kota	100%

2.3.3 Realisasi

Tabel 2.6
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	24184 orang	24184 orang	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik wilayah kota	100%	24268 orang	24268 orang	100%

2.3.4 Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok menjumpai beberapa permasalahan antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan masalah terberat yang dihadapi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman melakukan pengawasan langsung terhadap pekerjaan fisik sehingga memerlukan keterampilan khusus.

b. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan.

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan fisik untuk mencapai target sesuai yang dituangkan diatas masih minim sehingga bisa mempengaruhi secara langsung terhadap pembangunan Kota Solok.

c. Kebutuhan lahan

Untuk melaksanakan pekerjaan fisik dibutuhkan pembebasan lahan. Pada kenyataan dilapangan masih banyak lahan yang belum sepenuhnya bebas sehingga menggagalkan rencana yang tertuang dalam DPA dan Renstra.

d. Belum tersediannya data perumahan yang lengkap dan valid.

Solusi ;

a. Mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga bisa melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik dan pekerjaan lainnya dengan sebaik-baiknya.

b. Berusaha meningkatkan penambahan anggaran untuk pekerjaan fisik demi mempercepat pencapaian target yang



dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.

- c. Memaksimalkan pelaksanaan pembebasan lahan dengan pihak terkait (Badan Pertanahan Nasional, Notaris, dll) atau pengguna fisik pekerjaan sehingga tidak terdapat lagi kendala dalam melaksanakan pekerjaan.
- d. Melengkapi data yang dibutuhkan sehingga dapat dijadikan dalam penyusunan perencanaan dengan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok.

2.4 Urusan Perumahan Rakyat

2.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota, ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Kab/Kota
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintahan Daerah Kab/Kota.



2.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 2.7
Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kab/Kota	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%

2.6.4 Realisasi

Tabel 2.8
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kab/Kota	100%	0 orang	0 orang	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program	100%	0 orang	0 orang	100%



Daerah Kab/Kota	Pemerintah Daerah Kab/Kota				
-----------------	----------------------------	--	--	--	--

2.6.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Dalam pencapaian target, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok menjumpai beberapa permasalahan antara lain:

- a. Keterbatasan prasarana dan sarana Kantor
Disebabkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perangkat daerah baru dengan prasarana dan sarana yang masih kurang sehingga memerlukan sarana dan prasarana penunjang operasional;
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia(SDM)
Dalam hal melakukan pendataan lokasi rumah pada daerah rawan bencana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan tenaga SDM untuk turun langsung ke lapangan, sedangkan jumlah personil yang ada saat ini belum memadai;
- c. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan kegiatan.
Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan agar mencapai target sesuai yang dituangkan diatas masih minim sehingga bisa mempengaruhi secara langsung terhadap Pembangunan kota Solok.
- d. Belum tersediannya data perumahan dan Kawasan rawan bencana yang lengkap dan valid.



Solusi :

- a. Mengusulkan tambahan sarana dan prasarana untuk penunjang operasional pekerjaan.
- b. Mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga bisa melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
- c. Berusaha meningkatkan penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian target yang dibebankan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Melengkapi data yang dibutuhkan sehingga dapat dijadikan dalam penyusunan perencanaan.

2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

2.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ditetapkan jenis pelayanan dasar pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada pemerintah kabupaten/kota yaitu :

- a. Pelayanan ketentraman ketertiban umum.
- b. Pelayanan Informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Jenis pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

2.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 2.9
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan ketentraman ketertiban umum	Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Solok yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

2.5.3 Realisasi

Tabel 2.10
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1	Pelayanan ketentraman ketertiban umum	Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	70000 orang	70000 orang	96,67%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	83907 orang	83907 orang	100%
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Solok yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	83907 orang	83907 orang	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan	100%	100 orang	100 orang	96%



	korban bencana	evakuasi korban bencana				
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	82 orang	100 orang	94,60%

2.5.4 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Dalam Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Solok Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
- Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.
- Sumber Daya Manusia yang terbatas.

Untuk memecahkan masalah tersebut diatas, dilakukan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan;
- Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.



- d. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.

Permasalahan yang dihadapi Trantibum linmas urusan kebencanaan yakni :

- a. Tidak adanya anggaran untuk Pengadaan rambu- rambu evakuasi bencana yang permanen, saat ini yang teranggarnya hanya pengadaan stiker untuk rambu evakuasi bencana, dalam kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- b. Tidak adanya anggaran kegiatan SPM lainnya seperti Pelatihan mitigasi Bencana dalam kegiatan pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Bencana
- c. Kegiatan penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Solusi :

Sesuai Permendagri no. 58 tahun 2021 maka seluruh anggaran SPM wajib dilaksanakan dan dianggarkan, untuk itu Solusi dari kegiatan ini yakni harus ada anggaran dalam kegiatan BPBD kebencanaan urusan trantibumlinmas.

2.6 URUSAN SOSIAL

2.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ditetapkan jenis pelayanan dasar pada urusan sosial pada pemerintah kabupaten/kota yaitu :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luarpanti;

- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota di luar panti.

2.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 2.11
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial Diluar Panti	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar Panti	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara Korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%

2.6.3 Realisasi

Tabel 2.12
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

N O	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	10 orang	10 orang	100%



2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial Diluar Panti	100%	30 orang	37 orang	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	15 orang	15 orang	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar Panti	100%	25 orang	25 orang	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara Korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	871 orang	871 orang	100%

2.6.4 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Masalah yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain adalah, adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang mengakibatkan masih adanya angka kemiskinan di Kota Solok.

Adapun upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- a) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan upaya peningkatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
- b) Pemberdayaan Fakir Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya,
- c) Pembinaan Anak Terlantar di Rumah Singgah dan



d) Pemberian Pelayanan Terhadap Lansia Terlantar di Istana Lansia,

e) Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial serta melaksanakan kegiatan pelayanan/rehabilitasi kesejahteraan sosial, baik yang bersifat pelayanan publik diantaranya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat stimulant untuk usaha ekonomi produktif para penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu upaya untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan dan dilakukan setiap tahun.

Tujuan dilaksanakan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonominya antara satu daerah dengan daerah lainnya secara regional dan nasional dan untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonominya serta sebagai bahan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.



Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.7.6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 bahwa Pemerintah Kota Solok memperoleh skor 3,0047 atau dengan prestasi **Sedang (S)**, untuk Tahun 2024 dalam proses penilaian. Jika dibandingkan dengan se- Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Solok berada pada peringkat 12 (dua belas) dan diatas Provinsi Sumatera Barat, yang dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Skor Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah se- Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

No	Provinsi/Kab/Kota	Skor	Prestasi
1.	Kabupaten Dharmasraya	3,5036	Tinggi
2.	Kabupaten Pasaman	3,4923	Tinggi
3.	Kabupaten Agam	3,4916	Tinggi
4.	Kota Payakumbuh	3,3922	Sedang
5.	Kota Pariaman	3,2982	Sedang
6.	Kabupaten Padang Pariaman	3,2904	Sedang
7.	Kota Padang Panjang	3,2836	Sedang
8.	Kota Padang	3,2587	Sedang
9.	Kabupaten Tanah Datar	3,1599	Sedang
10.	Kota Bukittinggi	3,1002	Sedang
11.	Kabupaten Sijunjung	3,0505	Sedang
12.	Kota Solok	3,0047	Sedang
13.	Kabupaten Pesisir Selatan	3,0022	Sedang
14.	Kabupaten Lima Puluh Kota	2,9529	Sedang
15.	Kota Sawahlunto	2,9510	Sedang
16.	Kabupaten Solok	2,8251	Sedang
17.	Kabupaten Solok Selatan	2,7961	Sedang
18.	Kabupaten Pasaman Barat	2,7630	Sedang
19.	Provinsi Sumatera Barat	2,733	Sedang
20.	Kabupaten Mentawai	2,6992	Sedang

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.7.6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Dari tabel 3.51 terlihat, bahwa skor EKPPD Kota Solok 3 (tiga) tahun terakhir berfluktuasi, namun demikian dengan peningkatan kinerja perangkat daerah maka dinilai yang diperoleh sesuai dengan target yang ditetapkan

3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator sasaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Untuk mengukur nilai IPKD pada masing-masing dimensi menggunakan aplikasi IPKD dari Kemendagri dengan laman website <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>, semua data pengelolaan keuangan pada masing-masing dimensi IPKD di entri pada aplikasi ini pada waktu tertentu dan hasil penilaian masing-masing dimensi IPKD untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Penilaian IPKD setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibagi dalam beberapa kluster dengan kategori sesuai kemampuan keuangan daerah dalam kategori kelompok tinggi, sedang dan rendah. Pemerintah Daerah Kota Solok masuk dalam kategori kelompok daerah dengan kemampuan keuangan daerah "**Rendah**".

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Dimensi Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah

Dimensi IPKD	Bobot	Nilai 2024	Tingkat Capaian
Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1)	15	12,542	83,61%
Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2)	20	19,828	99,14%



Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3)	15	7,5	50%
Pemyerapan Anggaran (Dimensi 4)	20	13,333	66,67%
Kondisi Keuangan Daerah (Dimensi 5)	15	3,844	25,67%
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dimensi 6)	15	15	100%
Total	100	72,047	72,05%
Prediket	-	B	-

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Solok menargetkan nilai IPKD Kota Solok berada pada nilai B dengan realisasi B sehingga capaian 100% dengan kategori Baik. Capaian tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 69,69 atau naik 2,357 poin dari tahun 2023. Nilai IPKD Kota Solok lebih baik dari rata-rata nasional IPKD Kota dengan kemampuan keuangan Rendah, dimana rata-rata IPKD sebesar 71,866 dengan standar deviasi 7,288.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

a. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 574.165.815.580,44 atau 94,26% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target realisasi dan capaian pendapatan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi		Lebih/Kurang	
		APBD 2024	Rp	%	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	52.331.944.171,00	48.185.409.111,44	92,08	4.146.535.059,56	7,92
2	Pendapatan Transfer	556.811.117.166,10	525.980.406.469,00	94,46	30.830.710.697,10	5,54
	Jumlah	609.143.061.337,10	574.165.825.580,44	94,26	34.977.245.756,66	5,74

Sumber : Draft LKPD TA 2024 Unaudited (Badan Keuangan Daerah Kota Solok, 2025)

Berikut rincian target dan realisasi tahun 2024 dari ketiga komponen pendapatan daerah diatas :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp13.523.033.185,46 atau 102,62%, Retribusi Daerah sebesar Rp9.989.743.381,00 atau 85,03%, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp20.493.497.738,00 atau 100,00% dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp4.179.144.806,98 atau 60,46 dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi		Lebih/(Kurang)	
		APBD 2024	Rp	%	Rp	%
1	Pajak Daerah	13.177.676.214,00	13.523.033.185,46	102,62	345.356.971,46	2,62
2	Retribusi Daerah	11.748.459.945,00	9.989.743.381,00	85,03	(1.758.716.564,00)	(14,97)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.493.497.738,00	20.493.497.738,00	100,00	-	-



4	Lain-lain PAD yang Sah	6.912.310.274,00	4.179.134.806,98	60,46	(2.733.175.467,02)	(39,54)
	Jumlah	52.331.944.171,00	48.185.419.111,44	92,08	(4.146.535.059,56)	(7,80)

Sumber : LKPD 2023 Unaudited (Badan Keuangan Daerah Kota Solok, 2024)

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari :

- a. pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dalam hal ini dana yang ditransfer berupa dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, Dana Bagi Hasil (DBH)) dan dana Insentif daerah (DID).
- b. pendapatan transfer antar daerah, dalam hal ini dana yang ditransfer dapat berupa pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan khusus dari provinsi.

Realisasi pendapatan transfer tahun 2024 sebesar Rp525.980.406.469,00 atau 94,46% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp556.811.117.166,00. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi		Lebih/Kurang	
		APBD 2024	Rp	%	Rp	%
I	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	501.121.035.776,00	494.042.800.803,00	98,59	(7.078.234.973,00)	(1,41)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	16.975.485.305,00	16.992.545.000,00	100,10	17.059.695,00	0,10
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	400.782.048.000,00	399.200.128.012,00	99,61	(1.581.919.988,00)	(0,39)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	20.780.770.000,00	19.799.744.550,00	95,28	(981.025.450,00)	(4,72)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	47.207.679.471,00	42.675.330.241,00	90,40	(4.532.349.230,00)	(9,60)
5	Dana Insentif Daerah (DID)	15.375.053.000,00	15.375.053.000,00	100,00	-	-



II	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.690.081.390,10	31.937.605.666,00	57,35	(23.752.475.724,10)	(42,65)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.690.081.390,10	31.937.605.666,00	57,35	(23.752.475.724,10)	(42,65)
	Jumlah	556.811.117.166,10	525.980.406.469,00	94,46	(30.830.710.697,10)	(5,54)

Sumber : Draf LKPD 2024 Unaudited (Badan Keuangan Daerah Kota Solok, 2025)

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah Kota Solok Tahun 2024 sebesar Rp594.701.060.447,37 atau terealisasi 94,32%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Solok
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH/ BERKURANG	
	Anggaran 2023	REALISASI	%	(Rp.)	%
BELANJA DAERAH	630.547.571.002,10	594.701.060.447,37	94,32	41.203.873.983,50	6,53
Belanja Operasi	542.335.791.971,10	517.003.203.311,70	95,33	41.203.873.983,50	7,60
Belanja Pegawai	286.736.733.665,18	279.399.574.685,01	97,44	7.337.158.980,17	2,56
Belanja Barang dan Jasa	232.296.279.927,92	214.739.502.214,69	92,44	17.556.777.713,23	7,56
Belanja Bunga	4.973.462.976,00	4.820.639.475,00	96,93	152.823.501,00	3,07
Belanja Subsidi	15.660.000,00	15.660.000,00	100,00	-	-
Belanja Hibah	18.111.655.402,00	17.834.191.937,00	98,47	277.463.465,00	1,53
Belanja Bantuan Sosial	202.000.000,00	193.635.000,00	95,86	8.365.000,00	4,14
Belanja Modal	88.011.304.359,00	77.537.857.135,67	88,10	10.473.447.223,33	11,90
Belanja Modal Tanah	2.551.000.000,00	728.856.000,00	28,57	1.822.144.000,00	71,43
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.096.948.084,00	20.137.000.685,00	95,45	959.947.399,00	4,55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.152.324.120,00	25.428.379.231,67	93,65	1.723.944.888,33	6,35
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.445.078.530,00	29.496.631.703,00	83,22	5.948.446.827,00	16,78



Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.753.453.625,00	1.734.494.516,00	98,92	18.959.109,00	1,08
Belanja Modal Aset Lainnya	12.500.000,00	12.495.000,00	99,96	5.000,00	0,04
Belanja Tidak Terduga	200.474.672,00	160.000.000,00	79,81	40.474.672,00	20,19
Belanja Tidak Terduga	200.474.672,00	160.000.000,00	79,81	40.474.672,00	20,19

Sumber : LKPD 2023 *Unaudited* (Badan Keuangan Daerah Kota Solok 2024)

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kota Solok
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	JUMLAH			BERTAMBAH/ BERKURANG	
	Anggaran 2024	REALISASI	%	(Rp.)	%
PEMBIAYAAN DAERAH	21.404.509.665,00	21.448.059.059,91	100,20	(43.549.394,91)	(0,20)
Penerimaan Pembiayaan	49.279.509.665,00	49.315.095.352,91	100,07	(35.585.687,91)	(0,07)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.279.509.665,00	49.315.095.352,91	100,07	(35.585.687,91)	(0,07)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	49.279.509.665,00	49.315.095.352,91	100,07	(35.585.687,91)	(0,07)
Pengeluaran Pembiayaan	27.875.000.000,00	27.867.036.293,00	99,97	7.963.707,00	0,03
Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	25.375.000.000,00	25.367.036.293,00	99,97	7.963.707,00	0,03
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27.875.000.000,00	27.867.036.293,00	99,97	7.963.707,00	0,03
Pembiayaan Netto	21.404.509.665,00	21.448.059.059,91	100,20	(43.549.394,91)	(0,20)

Sumber : Draft LKPD 2024 *Unaudited* (Badan Keuangan Daerah Kota Solok 2025)

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2024 ditargetkan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dan Penerimaan pinjaman daerah. SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, merupakan selisih lebih realisasi



penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Defisit anggaran Tahun 2024 sebesar (Rp20.535.244.866,93) dengan pembiayaan netto sebesar Rp21.4448.059.059,91 sehingga diperoleh SILPA tahun 2024 sebesar Rp912.814.192,98. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Kota Solok
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	JUMLAH		
	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	609.143.061.337,10	574.165.815.580,44	94,26
BELANJA DAERAH	630.547.571.002,10	594.701.060.447,37	94,32
SURPLUS/ (DEFISIT)	- 21.404.509.665,00	- 20.535.244.866,93	95,94
PEMBIAYAAN NETTO	21.404.509.665,00	21.448.059.059,91	100,20
SILPA	-	912.814.192,98	

Sumber : Draft LKPD 2024 Unaudited (Badan Keuangan Daerah Kota Solok 2025)

5. INOVASI DAERAH

Pemerintah Kota Solok melalui Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar menerima Anugerah Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 atas dasar penganugerahan Innovative Government Award kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Inovasi Daerah Kota Solok dalam
penilaian Indeks Inovasi daerah Tahun 2024

N o	Nama	Instansi	Tahapan_Inova si	Bentuk_Inova si	Jenis_Inova si
1	DASIKU (Digitalisasi Sekolahku)	Dinas Pendidikan	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital
2	SENYUM	Dinas	Penerapan	Inovasi	Non Digital



	BAMANJA (Sekolah Nyaman Untuak Murik Baraja Manjaik)	Pendidikan		Pelayanan Publik	
	BULEK BASAGI (Buletin Sekolah Berbasis Digital)	Dinas Pendidikan	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital
	CAFE BACA	Dinas Pendidikan	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital
	SI KAMEK (Aplikasi Pembinaan Karakter Dan Mengapresiasi Prestasi Peserta Didik)	Dinas Pendidikan	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital
	PUSPINA (Pusat Pelayanan Informasi Bencana) KOTA SOLOK	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital
	UNI CANTIKA (Untuk Kendalikan Inflasi Caranya Optimalisasi Pekarangan)	Dinas Pangan	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital
	PEKAN KREATIVITAS	Dinas Pendidikan	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital
	PAMONG INOVASI DAERAH	Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Solok	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital
	LAPOR ON THE STREET	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital
	KACU SASUKU	Dinas Pendidikan	Penerapan	Inovasi Pelayanan	Non Digital



(Kamis Curhat Sapuluh Anam SUKU)				Publik	
TERAS SASUKU (Literasi Dan Pemberdayaan Barang Bekas Sapuluh Anam SUKU)	Dinas Pendidikan	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	
One For Eleven	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	
PENARI (Pelayanan Trintegrasi Dengan Pegadilan Negeri)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penerapan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	

6. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Solok tahun 2024 merupakan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok yang disampaikan kepada masyarakat, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Dari sudut pandang indikator makro capaian kinerja daerah terkait kesejahteraan masyarakat seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengalami kenaikan walau tidak begitu signifikan dari 79,66 ditahun 2023 menjadi 80,06 ditahun 2024. Angka pengangguran juga mengalami perbaikan kinerja dari 3,72 persen di tahun 2023 menjadi 3,62 persen pada tahun 2024. Untuk pertumbuhan ekonomi Kota Solok Tahun 2024 sebesar 4,55%, sedikit lebih rendah dari tahun 2023 yang mencapai 4,81% . Demikian halnya dengan pendapatan per kapita masyarakat Kota Solok juga mengalami kenaikan dari 67,60 juta per kapita pada tahun 2023



menjadi 69,99 juta per kapita pada tahun berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, seperti angka kemiskinan yang menunjukkan capaian yang kurang memuaskan yaitu dari 3,05 persen pada tahun 2023 menjadi 3,07 persen di tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk miskin juga mempengaruhi nilai indeks gini dari 0,256 pada tahun 2023 menjadi 0,251 pada tahun 2024. Ratio Gini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi.

Selain disampaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, fungsi penunjang urusan, dan tugas pembantuan, di dalam LPPD aspek-aspek lainnya yang dinilai adalah capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, capaian hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Kunci tersebut menggunakan pola outcome dan output, yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan. Dimana total Indikator Kinerja Kunci (IKK) berjumlah 126 IKK Outcome dan 471 IKK Output.

Capaian hasil penerapan Standar Pelayanan Minimal dimana sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta pengaturan Kementerian teknisnya bahwa capaian kinerja harus mencapai 100% pada tahun 2024, namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2024 masih ada capaian kinerja yang belum 100% yang penyebabnya sudah dijelaskan pada bab terdahulu.



Akhirnya, semoga LPPD Kota Solok Tahun 2024 memenuhi harapan semua pihak dan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik serta dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pada tahun mendatang.

Solok, Maret 2025
WALIKOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA